

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam politik luar negeri, Mohammad Hatta memiliki visi yang cemerlang, yaitu politik bebas aktif. Visi ini menjadi solusi strategi jangka panjang Indonesia di tengah tekanan geopolitik global. Prinsip ini telah menjadi landasan kebijakan luar negeri Indonesia semenjak era Perang Dingin, yang dijuluki sebagai negara yang "mendayung di antara dua karang" antar blok komunis dan kapitalis. Keberanian Indonesia untuk mengambil posisi independen di tengah konflik ideologi besar dunia menjadikan politik bebas aktif sebagai jalan agar Indonesia tidak menjadi objek dalam pertarungan internasional serta tetap berhak menentukan sikap (Kusno, p. 21 2014). Pernyataan ini menjadi *énoncé* dasar yang menetapkan otonomi mutlak Indonesia. Garis politik Indonesia harus ditentukan oleh kepentingannya sendiri dan dijalankan menurut keadaan dan kenyataan yang dihadapi. Artinya, kepentingan nasional adalah satu-satunya penentu arah kebijakan luar negeri. Politik Bebas aktif dicanangkan ketika Indonesia masih berjuang melawan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan, terutama di tahun 1948 (Hatta, 1953). Konteks krisis ini menunjukkan bahwa wacana Bebas aktif bukan kebijakan yang disusun dalam keadaan damai melainkan lebih jauh sebagai respons terhadap ancaman eksistensial.

Hatta memberikan pidato keterangan tentang status politik pemerintah di hadapan sidang BP KNIP pada tanggal 2 September 1948. Pidato tersebut secara historis menandai kelahiran wacana Bebas aktif. Dalam pidato tersebut, Hatta menegaskan: "Apakah bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaannya, harus memilih saja antara pro-Rusia atau pro-Amerika Serikat? Apakah tak ada pendirian lain yang harus ambil dalam mengejar cita-cita bangsa?". Pertanyaan retorik Hatta ini secara eksplisit menolak logika bipolar yang dipaksakan oleh kekuatan global. Pidato ini kemudian dihimpun sebagai naskah bersejarah dari lahirnya politik luar negeri Indonesia (Kusno, p. 21, 2014). Wacana ini sejak awal

bertujuan mempertahankan kebebasan dan menjaga keselamatan negara. Hal ini menunjukkan prioritas kebijakan luar negeri adalah keamanan dan kedaulatan (Hatta, 1953)

Makna dari bebas aktif yang dicetuskan oleh Hatta, pertama kata bebas mengandung pengertian tentang kesanggupan bangsa Indonesia untuk menentukan jalan sendiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik pihak manapun (Hatta, 1953). Konsep ini berarti Indonesia harus menjalin hubungan dengan semua bangsa di dunia, tidak membatasi diri hanya dengan negara Barat atau Timur saja. Konsep ini menolak aliansi militer atau politik permanen dengan blok mana pun. Kedua, kata aktif menjelaskan keyakinan bangsa Indonesia menuju pada terciptanya perdamaian dunia dan bersahabat dengan segala bangsa dan negara (Kusno, p. 21, 2014). Komponen Aktif menjadikan Indonesia sebagai agen perdamaian global yang bekerja secara proaktif. Indonesia harus berupaya bekerja energetik untuk pelestarian perdamaian dan mengurangi ketegangan yang ditimbulkan oleh dua blok.

Indonesia tidak dapat mengadopsi sikap netralitas murni karena netralitas memiliki makna yang presisi dalam hukum internasional, yaitu ketidakberpihakan terhadap negara-negara yang berperang. Sebagai anggota PBB, Republik Indonesia tidak dapat mengambil sikap netral karena terikat pada solidaritas internasional, sesuai Pasal 41 dan 43 Piagam PBB. Oleh karena itu, Bebas aktif harus diposisikan sebagai kebijakan aktif yang bertujuan untuk memperkuat perdamaian, bukan sekadar netral yang pasif (Hatta, 1953). Substansi bebas aktif juga tidak dimaknai sebagai hal yang diterima sebagaimana adanya *taken for granted*, tetapi gagasan yang murni berasal dari keinginan luhur dan telah dipertentangkan dengan gagasan yang muncul sebagai counter idea, atas dialektika gagasan/ide menjadikan bebas aktif sebagai pengetahuan yang utuh menjadi sebuah rezim kebenaran. Maka penjelasan pada penelitian ini memiliki kebaruan dalam memaknai ide/gagasan melalui teks pidato yang menjadi lapisan pengetahuan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia, posisi peneliti ada pada tataran substansi episteme bebas aktif dan membedakan penelitian dengan penelitian bebas aktif pada umumnya.

1.2 Pertanyaan Penelitian/Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang menetapkan bahwa Formasi Diskursif Politik Bebas aktif harus dianalisis melalui struktur internalnya formasi objek, konsep, dan modalitas enunciatif untuk memahami kondisi historis kemunculannya sebagai arsip kebijakan luar negeri, maka penelitian ini merumuskan masalah, yaitu bagaimana objek pengetahuan politik bebas aktif dibentuk melalui lapisan pengetahuan dan dimaknai dari relasi pengetahuan dan/kekuasaan oleh lingkungan internal yang muncul sebagai kebijakan luar negeri Indonesia.

- Menganalisis Formasi Objek wacana Politik Bebas aktif dengan mengidentifikasi sistem relasi yang memungkinkan objek-objek seperti "perdamaian abadi," "keselamatan negara," dan "anti-kolonialisme" muncul sebagai entitas diskursif, yang dipandang bukan sebagai benda yang sudah ada, melainkan sebagai formasi yang diatur oleh praktik diskursif.

- Menganalisis Formasi Konsep "Bebas" dan "Aktif" untuk menguraikan bagaimana konsep-konsep tersebut muncul dan berfungsi dalam jaringan pernyataan kebijakan luar negeri pasca-kemerdekaan, melalui sistem kemunculan *system of occurrence* di antara pernyataan, bukan berdasarkan arsitektur logis.

- Menjelaskan bagaimana Formasi Diskursif yang terdeskripsikan tersebut menjadi *Historis a priori* yang mengatur kemunculan, kelangsungan, dan transformasi wacana Bebas aktif dalam arsip kebijakan luar negeri Indonesia, di mana *Historis a priori* ini adalah syarat realitas bagi pernyataan tersebut.

1.3 Manfaat Penelitian

- Manfaat Akademis: Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan menyajikan penerapan metodologi Arkeologi Pengetahuan Foucault pada bidang kebijakan luar negeri, yang secara eksplisit mengoperasikan konsep *Historis a priori* sebagai syarat realitas dari pernyataan Bebas aktif. Hal ini memungkinkan pengayaan metode Foucault karena bidang kebijakan luar negeri dan hubungan internasional jarang dianalisis menggunakan lensa Formasi Diskursif. Selain itu,

penelitian ini secara metodologis mengkritik Sejarah Ide tradisional yang cenderung fokus pada origin dan kesinambungan. Sebaliknya, analisis ini akan menekankan pada diskontinuitas, dispersi, dan kelangkaan pernyataan Bebas aktif, yang merupakan fokus arkeologi.

- Manfaat Praktis: Hasil analisis Formasi Diskursif Bebas aktif akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi para praktisi dan pembuat kebijakan, dengan menyajikan hukum dari apa yang bisa dikatakan (*law of what can be said*) dalam arsip kebijakan luar negeri. Pemahaman ini dapat menjadi pedoman dalam merumuskan dan melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang politik maupun ekonomi, sebagaimana disarankan oleh sumber. Penelitian ini juga memperkuat nilai-nilai yang terkandung dalam pandangan politik Mohammad Hatta, seperti kejujuran, moralitas, dan demokratis, yang layak dijadikan teladan untuk masyarakat Indonesia dan generasi yang akan datang. Peneladanan moralitas Hatta yang dicirikan oleh kejujuran adalah kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perbuatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam lima bab yang terstruktur secara koheren, dengan setiap bab berkontribusi secara progresif untuk menjawab rumusan masalah.

BAB I: PENDAHULUAN Bab ini berfungsi sebagai pengantar penelitian. Bab ini menyajikan latar belakang masalah yang menguraikan konteks historis kemunculan Politik Bebas aktif yang dicetuskan oleh Mohammad Hatta, termasuk pondasi ideologi dan nilai-nilai politiknya. Bab ini juga memberikan justifikasi teoritis yang mendalam mengenai perlunya penggunaan Arkeologi Pengetahuan Foucault. Bagian akhir bab ini memuat perumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU Bab ini menyajikan fondasi teoritis yang akan digunakan untuk menganalisis fenomena

yang diteliti serta mengulas penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, dengan membagi pembahasan menjadi dua sub-topik utama, yaitu Landasan Teori mengenai Relasi Pengetahuan dan Kekuasaan, dan Kajian Empiris terkait Politik Bebas aktif Indonesia.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN Bab ini berfungsi sebagai landasan operasional, merinci kerangka dan teknik yang digunakan untuk meneliti wacana Politik Bebas aktif Indonesia. Dengan menempatkan kajian dalam kacamata post-strukturalis, metodologi ini dirancang untuk tidak hanya mendeskripsikan konten wacana, tetapi juga untuk mengungkap relasi kekuasaan dan pengetahuan yang membentuk narasi historis dan kontemporer kebijakan luar negeri.

BAB IV: ANALISIS ARKEOLOGIS FORMASI DISKURSIF POLITIK BEBAS AKTIF Bab ini adalah inti penelitian yang menyajikan temuan dan analisis empiris untuk menjawab Rumusan Masalah. Analisis ini akan menguraikan formasi objek (bagaimana kepentingan nasional dikonstruksi), Formasi konsep bebas dan aktif, dan Formasi modalitas enunciatif posisi subjek yang berwenang berbicara dalam wacana Bebas aktif. Bab ini menyimpulkan formasi diskursif bebas aktif secara keseluruhan untuk menentukan Hukum (*law*) dari arsip dan historis (*a priori*) kebijakan luar negeri Indonesia.

BAB V: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Bab ini menyajikan rangkuman temuan utama penelitian, memberikan jawaban langsung atas Rumusan Masalah. Kesimpulan akan merangkum secara spesifik Formasi Diskursif Bebas aktif dan perannya sebagai *Historis a priori*. Bab ini juga mencakup implikasi teoritis dan saran praktis.